

POLITIK ETIS DAN BANGKITNYA KESADARAN BARU PERS BUMIPUTRA

Miftahul Habib Fachrurozi

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi No.24 Tasikmalaya Jawa Barat

email: miftahul.habib@unsil.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui perkembangan awal pers berbahasa anak negeri dan pers bumiputra di Hindia Belanda, (2) mengetahui lahirnya kebijakan politik etis di Hindia Belanda, (3) mengetahui kaitan politik etis dan bangkitnya kesadaran baru pers bumiputra. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang dijabarkan oleh Kuntowijoyo. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pers berbahasa anak negeri muncul dan berkembang pada paruh kedua abad kesembilan belas. Pers berbahasa anak negeri pada masa itu memiliki orientasi komersial dan misionaris. Pers bumiputra baru muncul di penghujung abad kesembilan belas dengan terbitnya *Pewarta Prijaji*. Kebijakan politik etis di Hindia Belanda dilatarbelakangi oleh merosotnya kondisi sosial-ekonomi kaum bumiputra akibat kegagalan liberalisme serta perubahan peta politik di Belanda. Edukasi merupakan program terpenting dalam politik etis. Kebijakan ini mewariskan semangat kemajuan serta memunculkan kelas sosial baru yakni bumiputra terpelajar. Politik etis berdampak ke dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang pers. Kaitan antara politik etis dan kebangkitan kesadaran baru pers bumiputra terlihat dalam sejumlah surat kabar yang dikelola oleh kaum bumiputra terpelajar. Surat kabar tersebut antara lain *Bintang Hindia* yang dikelola oleh Abdul Rivai, *Retnodoemilah* yang dikelola Wahidin Soedirohoesodo serta *Medan Prijaji* serta *Poetri Hindia* yang dipimpin Tirto Adhi Soerjo. Surat kabar tersebut dengan jelas mencerminkan semangat kemajuan yang merupakan warisan kebijakan politik etis. Semangat kemajuan inilah yang terus diartikulasikan oleh bumiputra terpelajar pada era setelahnya dan kelak berkembang menjadi kesadaran nasional bangsa Indonesia untuk melepaskan diri cengkeraman kolonialisme Belanda.

Kata Kunci : Bumiputra, Kesadaran Baru, Pers, Politik Etis.

Abstract

This study aims: (1) to find out the early development of the native language press and indigenous press in the Dutch East Indies, (2) to know the birth of ethical-political policies in the Dutch East Indies, (3) to find out the ethical-political connection and the rise of new awareness of the indigenous press. This research was conducted using the historical method described by Kuntowijoyo. The results of the study show that the native language press emerged and developed in the second half of the nineteenth century. The native language press at that time had a commercial and missionaries orientation. The indigenous press only appeared at the end of the nineteenth century with the publication of *Pewarta Prijaji*. Ethical political policy in the Dutch East Indies was motivated by a decline in the socio-economic conditions of the indigenous people due to the failure of liberalism and changes in the political condition in the Netherlands. Education is the most important program in ethical politics. This policy inherited the spirit of progress and gave rise to a new social class namely educated indigenous. Ethical politics has an impact on various fields of life including the press. The connection between ethical politics and the revival of the new awareness of the indigenous press is seen in a number of newspapers

managed by educated indigenous. The newspapers included the *Bintang Hindia* managed by Abdul Rivai, *Retnodoemilah* managed by Wahidin Soedirohoesodo, *Medan Prijaji* and *Poetri Hindia* led by Tirto Adhi Soerjo. The newspaper clearly reflects the spirit of progress which is a legacy of ethical-political policy. The spirit of progress that continues to be articulated by educated indigenous in the era that followed and later developed into the national consciousness of the Indonesian people to escape the grip of Dutch colonialism.

Keywords: Indigenous, New Consciousness, Press, ethical-political

PENDAHULUAN

Surat kabar atau pers secara umum berperan penting untuk menyebarkan informasi kepada khalayak luas. Pers juga merupakan sarana bagi seseorang untuk menyebarkan gagasan atau pendapatnya. Di sisi lain, pers juga memiliki kaitan erat dengan politik. Pers memiliki fungsi persuasif yang mampu membentuk pendapat umum dan mempengaruhi opini masyarakat terhadap isu sosial-politik yang tengah berkembang (Nimmo, 1989: 217). Hubungan erat antara pers dan politik tersebut juga terjadi di Hindia Belanda.

Kemunculan pertama pers di Hindia Belanda dimungkinkan dengan kehadiran mesin cetak di wilayah tersebut. Mesin cetak telah muncul di Hindia Belanda sejak zaman *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), tepatnya pada tahun 1668 (Tim Periset Seabad Pers Kebangsaan, 2008: ix). Meskipun demikian, pers pertama tidak hadir pada kurun waktu yang sama dengan beroperasinya mesin cetak tersebut. Butuh waktu hampir satu abad lamanya hingga surat kabar pertama di Hindia Belanda, yaitu *Bataviase Nouvelles* muncul pada tahun 1744 (Harsono, 2010: 64).

Kehadiran *Bataviase Nouvelles* tidak disambut dengan baik oleh para petinggi VOC. Mereka menganggap apabila informasi perdagangan yang ada dalam surat kabar dibaca oleh kongsi dagang lain, maka hal tersebut dapat mengancam kepentingan VOC. Kehadiran *Bataviase Nouvelles* memang

tidak berlangsung lama. Pada tahun 1746 Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron von Imhoff resmi melarang penerbitan surat kabar tersebut (Smith, 1986: 1). Meskipun hanya berumur singkat, namun kehadiran *Bataviase Nouvelles* menjadi tonggak awal sejarah pers di Hindia Belanda.

Memasuki paruh pertama abad kesembilan belas, sikap penguasa kolonial di Hindia Belanda terhadap pers mulai melunak. Pada tahun 1810 di masa pemerintahan Daendels, pemerintah kolonial menerbitkan surat kabar resmi milik pemerintah bernama *Bataviaasche Koloniale Courant* (Smith, 1986: 52). Selain *Bataviaasche Koloniale Courant*, surat kabar resmi pemerintah lain yang juga pernah terbit pada paruh pertama abad kesembilan belas antara lain *The Java Government Gazette* yang terbit pada 1812, *Javasche Courant* pada tahun 1829. Mayoritas pers tersebut lebih mengedepankan berita komersial dengan memuat banyak informasi perdagangan sebagaimana *Bataviase Nouvelles*.

Surat kabar swasta baru muncul setelah tahun 1831. Surat kabar swasta yang terbit pada masa tersebut masih lebih mengedepankan kepentingan ekonomi di samping mulai bermunculan pula surat kabar dengan orientasi misionaris (Fachruruzi, 2017: 24). Keterlibatan kaum bumiputra dalam bidang pers pada masa tersebut bisa dibilang masih sangat terbatas. Aktivitas pers pada masa tersebut didominasi oleh orang-orang Eropa dan terkadang orang-orang Cina (Surjomihardjo, 1980: 31).

Bahasa yang digunakan oleh pers pada masa tersebut juga bahasa Belanda. Pers bumiputra masih belum muncul sama sekali, sehingga era ini sering disebut sebagai “babak putih sejarah pers Indonesia”. Istilah tersebut muncul dikarenakan nihilnya partisipasi kaum bumiputra dalam dunia pers waktu itu

Pers bumiputra yang dimaksud disini adalah pers yang dikelola oleh kaum bumiputra untuk kepentingannya sendiri serta menggunakan bahasa daerah atau Melayu. Pers bumiputra harus dibedakan dengan pers berbahasa anak negeri yang diterbitkan oleh orang-orang Belanda sekalipun menggunakan bahasa daerah atau Melayu. *Bromartani* merupakan pers berbahasa anak negeri pertama yang terbit pada tahun 1855 (Hutagalung, 2003: 55). Surat kabar tersebut terbit di Surakarta dengan menggunakan bahasa Jawa. Kehadiran *Bromartani* segera disusul dengan kehadiran pers berbahasa anak negeri lain yang mulai menjamur pada paruh kedua abad kesembilan belas. Meskipun pers berbahasa anak negeri mulai menjamur, namun peran kaum bumiputra pada bidang pers masih sangat terbatas.

Memasuki abad kedua puluh, kondisi sosial politik di Hindia Belanda mengalami dinamika yang kompleks akibat diberlakukannya politik etis. Edukasi merupakan program terpenting politik etis (Latif, 2012: 142). Program edukasi inilah yang mendorong timbulnya kesadaran baru bagi kaum bumiputra di Hindia Belanda pada awal abad kedua puluh. Kesadaran tersebut kemudian mempengaruhi nyaris seluruh bidang kehidupan termasuk pers.

Selama ini kajian mengenai sejarah pers di Indonesia masih terbilang minim. Kajian sejarah Indonesia selama ini lebih fokus kepada narasi-narasi besar yang berkaitan langsung dengan penguasa atau pembentukan *nation-state* (Nordholt, dkk, 2008: 1-2). Meskipun pers memiliki peranan penting dalam

upaya pembentukan kesadaran keindonesiaan, namun hal tersebut nampaknya masih belum banyak menarik minat para sejarawan untuk mengkaji sejarah pers secara lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk mengeksplorasi lebih jauh kaitan antara politik etis serta bangkitnya kesadaran baru pers bumiputra di Hindia Belanda pada awal abad kedua puluh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo, dengan tahapan (1) Pemilihan topik, (2) Heuristik (pengumpulan sumber), (3) Kritik sumber atau verifikasi, (4) Interpretasi atau penafsiran, dan (5) Historiografi (Kuntowijoyo, 2013: 69-80). Pemilihan topik merupakan tahap untuk menentukan judul dengan pertimbangan tertentu berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Heuristik merupakan tahap mengumpulkan sumber baik primer maupun sekunder untuk diolah pada tahap selanjutnya. Kritik sumber dilakukan untuk menguji keabsahan sumber secara eksternal melalui bentuk serta kondisi fisik maupun kritik eksternal melalui konten serta isi sumber sejarah. Interpretasi merupakan tahap menafsirkan dan memahami sumber yang telah didapatkan. Historiografi merupakan tahap penulisan serta penyusunan seluruh penelitian berdasarkan kaidah penulisan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Awal Pers Berbahasa Anak Negeri dan Pers Bumiputra di Hindia Belanda

Paruh kedua abad kesembilan belas di Hindia Belanda ditandai dengan kelonggaran kegiatan pers. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi pihak swasta di Hindia Belanda dalam bidang pers. Pers tidak lagi dimonopoli oleh pers terbitan

pemerintah kolonial saja. UU Pers tahun 1856 menjadi titik balik perkembangan pers di Hindia Belanda. Sensor ketat yang diberlakukan terhadap pers Belanda justru mendorong kemunculan pers berbahasa anak negeri di negara koloni ini (Adam, 2003: 24). Di sisi lain, orang-orang Indo-Eropa dan Cina juga mulai melirik peluang meraih keuntungan melalui dunia pers. Dampaknya, pers berbahasa anak negeri dengan berbagai macam orientasi mulai tumbuh dan menjamur di Hindia Belanda.

Kehadiran *Bromartani* pada tahun 1855 menandai titik awal kemunculan pers berbahasa anak negeri di Hindia Belanda (Hill, 2007: 25). *Bromartani* dipimpin oleh seorang Indo bernama C.F. Winter dan putranya Gustaaf Winter. Surat kabar ini terbit di Surakarta yang merupakan salah satu pusat kebudayaan Jawa. Oleh karena itu, *Bromartani* diterbitkan dengan menggunakan bahasa *kromo inggil*, ragam bahasa Jawa tinggi. Konten *Bromartani* berkisar pada informasi umum maupun artikel tentang ilmu pengetahuan yang nampaknya memang ditujukan kepada para pelajar yang menempuh pendidikan di kota tersebut.

Kehadiran *Bromartani* yang lebih mengedepankan informasi umum ketimbang orientasi komersial menunjukkan perkembangan fungsi pers di Hindia Belanda. C.F. Winter nampaknya berkeinginan menjadikan *Bromartani* sebagai bacaan umum bagi para pelajar di Surakarta (Adam, 2003: 31). Di sisi lain, sekolah-sekolah Eropa yang ada di Surakarta masih kesulitan memenuhi kebutuhan bahan bacaan bagi murid-murid dari kaum bumiputra. Oleh karena itu, kehadiran *Bromartani* bisa dibilang bertujuan untuk mengisi kekosongan bacaan tersebut.

Setahun berselang kemunculan *Bromartani*, muncullah surat kabar pertama berbahasa Melayu di Hindia Belanda. Surat kabar tersebut bernama

Soerat Kabar Bahasa Melaijoe yang terbit di Surabaya. *Soerat Kabar Bahasa Melaijoe* diterbitkan oleh seorang penerbit ternama di kota tersebut bernama E. Fuhri. Konten *Soerat Kabar Bahasa Melaijoe* berbeda dengan konten *Bromartani*. *Soerat Kabar Bahasa Melaijoe* lebih banyak menyajikan berita-berita komersial untuk memenuhi kebutuhan informasi pedagang dan pemilik toko di Jawa Timur (Adam, 2003: 32). Oleh karena itu, pelanggan surat kabar ini diperkirakan berasal dari kalangan pedagang dan bukan murid sekolah-sekolah Eropa sebagaimana *Bromartani*.

Sayangnya, *Soerat Kabar Bahasa Melaijoe* maupun *Bromartani* tidak bertahan lama. Sulitnya menemukan pelanggan serta sirkulasi yang amat terbatas menjadi alasan utama kegagalan kedua pelopor pers berbahasa anak negeri tersebut. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat sejumlah penerbit untuk menerbitkan berbagai macam surat kabar pada era setelahnya.

Surat kabar paling sukses pada paruh kedua abad kesembilan belas adalah *Slomporet Melajoe*. *Slomporet Melajoe* diterbitkan oleh penerbit van Dorp di Semarang pada tahun 1860 (Juliati & Asnan, 2012: 298). Berbeda dengan *Bromartani* dan *Soerat Kabar Bahasa Melaijoe* yang berumur singkat, *Slomporet Melajoe* mampu bertahan hingga setengah abad lamanya dan baru berhenti terbit pada tahun 1911. *Slomporet Melajoe* merupakan surat kabar dengan orientasi komersial dan banyak memuat berita yang bertujuan untuk kepentingan bisnis. Adapun bahasa yang digunakan oleh surat kabar ini adalah Melayu Pasar.

Selain *Slomporet Melajoe*, surat kabar lain yang juga meraih kesuksesan pada era ini adalah *Bintang Timoor*. Surat kabar ini diterbitkan oleh agen distributor *Slomporet Melajoe* di Surabaya bernama Gimberg Brothers &

Co. Terbit sejak 1862, *Bintang Timoor* memiliki orientasi komersial sebagaimana *Slompret Melajoe*. Surat kabar ini bahkan memiliki sirkulasi yang amat luas hingga menjangkau wilayah Sumatera dan Sulawesi Selatan (Adam, 2003: 39). *Bintang Timoor* juga menggunakan bahasa Melayu Pasar sebagai sarana menarik minat para pelanggannya.

Kesuksesan *Slompret Melajoe* dan *Bintang Timoor* menunjukkan bahwa pers pada masa itu lebih digunakan sebagai sarana penunjang aktivitas perdagangan. Di sisi lain, muncul pula koran dengan orientasi misionaris seperti *Biang-Lala* (terbit 1867 di Batavia) dan *Tjahaja Siang* (1868-Tondano) (Harsono, 2010: 64). Surat kabar dengan orientasi komersial dan misionaris lebih mudah mendapatkan pelanggan bila dibandingkan dengan surat kabar yang memuat artikel tentang sastra dan pendidikan seperti *Bromartani*. Meskipun demikian, redaksi *Slompret Melajoe* juga memuat tulisan-tulisan bertema sosial politik yang dikirimkan oleh para pelanggan mereka dari kalangan Tionghoa ataupun priayi (Adam, 2003: 55).

Keterlibatan kaum bumiputra dalam bidang pers pada masa ini masih sangat terbatas. Berbagai surat kabar yang telah disinggung di atas dan sejumlah surat kabar lain yang pernah terbit pada umumnya diterbitkan oleh perusahaan Belanda. Posisi redaktur juga kebanyakan diisi oleh orang-orang Tionghoa dan orang-orang Indo (Smith, 1980: 60). Hal ini dikarenakan orang-orang Tionghoa dan Indo dianggap memiliki penguasaan bahasa Melayu yang baik. Bahasa Melayu sendiri sejak lama telah digunakan dalam bidang perdagangan antar suku bangsa di Hindia Belanda (Mrazek, 2006: 47). Baru pada akhir abad kesembilan belas kaum bumiputra mulai berperan aktif dalam bidang pers.

Keterlibatan kaum bumiputra dalam bidang pers didorong oleh intensifikasi pendidikan kolonial yang dilakukan sejak tahun 1867. Kebijakan ini didorong oleh kebutuhan pengadaan pegawai rendah dari kaum bumiputra untuk menunjang perkembangan birokrasi kolonial (Abdullah, 2017: 37). Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah kaum bumiputra yang mampu menguasai baca-tulis. Kemampuan baca-tulis inilah yang menjadi modal keterlibatan kaum bumiputra dalam bidang pers. Salah satu yang paling terkenal adalah Dja Endar Moeda. Dja Endar Moeda tercatat pernah menjadi redaktur di sejumlah surat kabar seperti *Pertja Barat* dan *Soematra Courant* (Rahzen, dkk, 2008: 22). Tulisan-tulisannya berkisar pada upaya mendorong kesadaran kaum bumiputra untuk menempuh pendidikan. Meskipun demikian, jumlah kaum bumiputra yang bekerja sebagai redaktur surat kabar masih sangat sedikit.

Pers bumiputra baru benar-benar muncul pada penghujung abad kesembilan belas. *Pewarta Prijaji* bisa dianggap sebagai pelopor pers bumiputra di Hindia Belanda. Surat kabar ini dipimpin oleh seorang priayi bernama R.M. Koesoemo Oetoyo. *Pewarta Prijaji* terbit pada tahun 1900 di Semarang dengan menggunakan bahasa Melayu Pasar. *Pewarta Prijaji* banyak memuat artikel seputar dunia priayi seperti aturan yang harus dijalankan seorang priayi, informasi umum yang berkaitan dengan pekerjaan pangreh praja, dan sebagainya (Juliato dan Asnan, 2012: 299). Sayangnya, *Pewarta Prijaji* hanya bertahan sampai tahun 1903. Kesibukan R.M. Koesoemo Oetoyo sebagai bupati Ngawi menjadi alasan utama berhentinya surat kabar ini.

Orientasi komersial dan misionaris merupakan warna utama konten pers berbahasa anak negeri di Hindia Belanda pada paruh kedua abad kesembilan belas. Meskipun terdapat

sejumlah surat kabar yang memuat artikel bertemakan pendidikan atau bahkan sosial-politik, namun tema-tema ini kurang menarik minat para pelanggan surat kabar. Di sisi lain keterlibatan kaum bumiputra dalam bidang pers masih sangat terbatas dan baru mulai terlihat perannya di penghujung abad kesembilan belas. Hal ini merupakan gambaran umum perkembangan pers berbahasa anak negeri dan pers bumiputra di Hindia Belanda. Situasi ini dengan cepat berubah pada awal abad kedua puluh. Politik etis merupakan penyebab dari perubahan cepat dalam dunia pers Hindia Belanda.

Lahirnya Politik Etis di Hindia Belanda

Gelombang liberalisasi dan revolusi demokrasi yang menyebar di Eropa sekitar tahun 1840-an turut mempengaruhi kondisi politik di Belanda. Partai Liberal Belanda di bawah pimpinan Rudolf Thorbecke berhasil mendapat momentum untuk mengubah sistem politik di negara tersebut (Abdullah, 2017: 35). Perubahan konstitusi terjadi pada tahun 1848 dan mengubah sistem pemerintahan di Belanda menjadi Monarki Konstitusional. Nilai-nilai liberalisme seperti kebebasan individu, pengakuan atas hak milik pribadi, serta perluasan perusahaan swasta segera mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat Belanda. Hal tersebut juga mempengaruhi kebijakan negara koloni Belanda di Asia, Hindia Belanda.

Dampak Liberalisme di Hindia Belanda yang paling menonjol terlihat pada bidang ekonomi. Tahun 1870 merupakan titik balik kebijakan ekonomi di Hindia Belanda. Pemberlakuan Undang-undang Agraria dan Undang-undang Gula memberikan jalan bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Hindia Belanda (Furnivall,

2009: 187-189). Kehadiran perusahaan swasta tersebut mengubah haluan kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda (Ricklefs, 2011: 227). Liberalisme secara resmi telah diberlakukan di Hindia Belanda dan kebijakan ini dianggap akan menguntungkan semua pihak.

Kehadiran perusahaan-perusahaan swasta di Hindia Belanda pada mulanya dianggap sebagai langkah maju untuk peningkatan kesejahteraan kerajaan Belanda dan negara koloni Hindia Belanda. Akan tetapi, dampak liberalisasi ekonomi yang terjadi rupanya tidak sejalan dengan apa yang dibayangkan sebelumnya. Kesenjangan ekonomi mulai terlihat di Hindia Belanda. Para pengusaha Belanda dan orang-orang Tionghoa menikmati keuntungan luar biasa dari sistem ini. Selain itu, keengganan pemerintah kolonial melakukan unifikasi ekonomi membuat kondisi sosial ekonomi kaum bumiputra semakin terpuruk (Furnivall, 2009: 236). Kemerosotan kondisi kaum bumiputra inilah yang mendorong diberlakukannya kebijakan baru di Hindia Belanda.

Kondisi tersebut menarik perhatian tokoh-tokoh pers Belanda. Sejumlah tokoh pers mulai muncul untuk menyampaikan isu-isu sosial politik dalam berbagai artikel di surat kabar. Salah satunya isu yang paling sering dibahas adalah tentang perbaikan kondisi kaum bumiputra di Hindia Belanda (Simbolon, 2008: 168). A. Kuyper, seorang tokoh partai konservatif mulai mengusulkan suatu kebijakan kemanusiaan di Hindia Belanda. Piet Brooshoft, redaktur surat kabar *De Locomotief* juga menyampaikan gagasan serupa. Ia mengusulkan otonomi lokal sebagai solusi untuk memperbaiki kondisi kaum bumiputra. Meskipun demikian, usulan ini baru ditanggapi secara serius sejak C. T. Van Deventer menulis artikel berjudul "*Een Eereschuld*" (Hutang

Budi) di jurnal *De Gids*. Isi artikelnya secara tegas menuntut penyelidikan tentang kewajiban balas budi bangsa Belanda terhadap kaum bumiputra di Hindia Belanda akibat eksploitasi ekonomi pada era sebelumnya (van Niel, 2009 : 20).

Perubahan peta politik di Belanda membuat gagasan van Deventer lebih mudah diterima oleh para politisi disana. Keberhasilan Partai Kristen dan Partai Sosial Demokrat memenangkan pemilihan umum membuat gagasan perbaikan kondisi bumiputra mulai dibicarakan secara serius di parlemen Belanda. Koalisi ini bersepakat untuk membuat suatu kebijakan bagi kaum bumiputra di Hindia Belanda berdasarkan prinsip-prinsip kekristenan (Niel, 2009: 55). Gagasan untuk memenuhi kewajiban moral dalam perbaikan kondisi kaum bumiputra menjadi landasan utama dalam pemikiran koalisi ini. Usulan parlemen ini segera mempengaruhi kebijakan kerajaan Belanda untuk segera merealisasikan politik etis di Hindia Belanda.

Sukses pemerintahan di kerajaan Belanda turut mempercepat realisasi pemberlakuan politik etis di Hindia Belanda. Pada 6 September 1898, Wilhelmina dinobatkan sebagai ratu Belanda yang baru (Simbolon, 2008: 191). Situasi ini memberikan angin segar bagi para pendukung politik etis. Ratu baru ini mendukung penuh gagasan kelompok etis untuk melakukan perubahan kebijakan di Hindia Belanda. Tiga tahun kemudian perubahan kebijakan tersebut benar-benar terlaksana. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menyampaikan seruan pembaruan kebijakan kolonial dalam sebuah pidato kerajaan. Pidato ini kemudian disambut dengan hangat oleh pendukung politik etis. Hal tersebut yang kemudian dianggap sebagai tonggak awal kebijakan politik etis.

Politik etis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta memperbaiki kondisi kaum bumiputra. Edukasi sering dianggap sebagai program pokok dari politik etis (Latif, 2012: 142). Semangat politik etis ini membuat banyak perubahan terhadap rakyat Hindia Belanda. Perubahan paling besar terjadi pada kaum bumiputra. Edukasi atau pendidikan menjadi program sentral dalam politik etis. C. T. van Deventer sendiri meyakini jika kaum bumiputra harus ikut berpartisipasi dalam perubahan ini. Pendidikan, terutama pendidikan Barat dianggap sebagai cara yang tepat untuk mulai melibatkan kaum bumiputra. Meskipun demikian, program pendidikan ini dilaksanakan secara sangat terbatas dimana hanya golongan bangsawan atau kalangan priayi saja yang menikmati pendidikan Barat (Niel, 2009 : 77). Lewat program pendidikan ini pula nantinya akan muncul golongan bumiputra terpelajar yang mewacanakan kemajuan kaum bumiputra di Hindia Belanda.

Politik etis memang tidak sepenuhnya berhasil dalam pelaksanaannya terutama dari sudut pandang kaum bumiputra. Pemerintah kolonial nampak hanya menjadikan kaum bumiputra sebagai obyek dari kebijakan politik etis. Kaum bumiputra sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam perumusan kebijakan untuk memperbaiki taraf hidup mereka sendiri. Pada akhirnya, obyektivikasi ini menyebabkan kaum bumiputra sama sekali tidak diajak untuk memahami dan memberikan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi sendiri.

Di sisi lain, politik etis sesungguhnya juga merupakan alat pemerintah kolonial untuk mempertahankan kekuasaannya di Hindia Belanda. Gagasan ini datang dari seorang ahli kajian Islam dari Universitas Leiden bernama Snouck Hurgronje. Ia menganggap dengan

memberikan pendidikan Barat, maka kaum bumiputra di Hindia Belanda bisa diarahkan menuju kesatuan budaya dengan orang-orang Belanda (Samuel, 2010 : 24-25). Proses penyatuan budaya ini diharapkan mampu memunculkan kaum bumiputra terpelajar yang mendukung kekuasaan kolonial. Kaum bumiputra terpelajar inilah yang diharapkan mampu membantu kontrol pemerintah kolonial terhadap masyarakat Hindia Belanda secara keseluruhan.

Politik etis melahirkan suatu kelas sosial baru dalam lingkungan kaum bumiputra (Abdullah, 2017: 41). Kelas sosial baru ini adalah kaum bumiputra yang mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan kolonial. Kelas ini lebih dikenal dengan istilah bumiputra terpelajar. Kebanyakan dari bumiputra terpelajar ini adalah para mahasiswa yang menempuh pendidikan kedokteran di *School tot Opleiding van Indische Artsen* (STOVIA). Para mahasiswa kedokteran ini bukan hanya mendapatkan akses terhadap pendidikan barat, akan tetapi mereka juga berbicara dalam bahasa Belanda, berbusana ala orang Belanda, dan mengikuti gaya hidup sebagaimana orang Belanda (Pols, 2019: 27). Hal inilah yang membuat para bumiputra terpelajar mulai akrab dengan modernitas dan budaya barat.

Kemerosotan kondisi sosial ekonomi kaum bumiputra juga mendorong munculnya kesadaran baru di kalangan bumiputra terpelajar. Di sisi lain, kesadaran ini juga muncul akibat adanya kecemburuan sosial terhadap orang Tionghoa yang dianggap lebih maju. Kemajuan kaum Tionghoa salah satunya ditunjukkan dengan pendirian organisasi Tiong Hwa Hwee Koan (THHK) pada tanggal 17 Maret 1900 (Nio Joe Lan, 1940: 11). THHK merupakan organisasi yang berorientasi pada semangat kemajuan dan berfokus pada program pendidikan dan kebudayaan. Selain itu, kaum Tionghoa juga menerbitkan

sejumlah pers berorientasi kemajuan seperti *Li Po*, *Sien Po*, *Taman Pewarta*, dan *Loen Boen* (Adam, 2013: 131). Kehadiran THHK dan sejumlah pers Tionghoa inilah yang mendorong kesadaran kaum bumiputra terpelajar untuk mulai lebih memperhatikan nasib kaum bumiputra.

Kebijakan politik etis ini bagaimanapun mampu menumbuhkan kesadaran baru di kalangan bumiputra terpelajar. Kesadaran baru tersebut ialah semangat menggapai kemajuan. Semangat kemajuan ini terwujud dalam suatu keinginan mencapai status sosial yang ideal baik secara individu maupun kolektif yang meliputi kemajuan pendidikan, modernisasi, kehormatan, serta keberhasilan hidup (Latif, 2012 : 144). Semangat kemajuan ini yang nantinya akan terus berkembang ditangan kaum bumiputra terpelajar. Semangat ini pula yang memberikan dampak luas bagi perkembangan pers bumiputra di Hindia Belanda.

Politik Etis dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputra

Politik etis memiliki dampak luas dalam perkembangan pers bumiputra di Hindia Belanda. Kaum bumiputra terpelajar dengan cepat mampu menjadi lokomotif perubahan sosial-politik di Hindia Belanda. Mereka memanfaatkan pers untuk menyuarakan perbaikan kondisi kaum bumiputra serta mendorong kemajuan bangsanya. Kesadaran baru inilah yang menjadi warna utama dalam berbagai pers bumiputra di Hindia Belanda pada awal abad kedua puluh.

Bintang Hindia merupakan pers bumiputra pertama yang memiliki kesadaran baru tersebut. *Bintang Hindia* pertama kali terbit pada tahun 1903 dan menggunakan bahasa Melayu. *Bintang Hindia* diterbitkan oleh perusahaan penerbitan milik N.J Boon di Amsterdam (Poeze, 2008: 44). Surat kabar ini merupakan hasil kerja sama

seorang bumiputra terpelajar bernama Abdul Rivai dan seorang pensiunan *Koninklijk Nederlandsche-Indische Leger* (KNIL) bernama H. C. C. Clockener Broussons. Meskipun demikian, Abdul Rivai merupakan aktor utama di balik artikel-artikel yang terbit dalam *Bintang Hindia*, sementara Broussons lebih fokus kepada urusan sirkulasi surat kabar (Poeze, 2008: 46). *Bintang Hindia* merupakan surat kabar paling berpengaruh di Hindia Belanda pada awal abad kedua puluh. Hal ini dibuktikan dengan sirkulasi surat kabar ini yang mencapai 27.000 eksemplar pada tahun 1904. Besarnya sirkulasi *Bintang Hindia* tidak terlepas dari dukungan penuh Gubernur Jenderal van Heutsz yang memberikan subsidi kepada surat kabar ini (Adam, 2003: 171).

Gagasan utama yang terdapat dalam *Bintang Hindia* merupakan karya Abdul Rivai. Sejumlah gagasan penting yang ditulis Abdul Rivai dalam surat kabar *Bintang Hindia* adalah *kaoem moeda*, *perhimpoean kaoem moeda*, dan *bangsawan fikiran*. *Kaoem Moeda* merupakan kaum bumiputra yang memiliki pemikiran yang terbuka dan memuliakan dirinya dengan pengetahuan (Rivai, 1905). Abdul Rivai menginginkan *kaoem moeda* di Hindia Belanda berpendidikan tinggi. Tujuannya agar *kaoem moeda* memiliki kesadaran bersama dengan kaum bumiputra lain sehingga mampu memajukan kaum bumiputra di Hindia Belanda secara umum. *Perhimpoean Kaoem Moeda* merupakan wadah bagi *kaoem moeda* untuk berorganisasi dan mewujudkan tujuan mereka. *Bangsawan fikiran* merupakan status sosial bagi kaum yang berpendidikan tinggi (Rivai, 1906). *Bangsawan fikiran* menjadi status baru bagi kaum bumiputra terpelajar di Hindia Belanda pada masa itu.

Gagasan Rivai tersebut dilatarbelakangi oleh pandangannya terhadap kaum bumiputra di Hindia

Belanda pada masa itu. Rivai memandang jika ketertinggalan kaum bumiputra dari orang-orang Eropa disebabkan oleh pengaruh pemikiran primitif yang kental dengan takhayul lama (Pols, 2019: 40). Kepercayaan terhadap takhayul ini berkebalikan dengan pemikiran orang-orang Eropa yang lebih rasional dan modern. Kemampuan orang Eropa merangkul modernitas hanya mampu didapat melalui akses terhadap pendidikan. Oleh karena itu, Rivai menyerukan kaum bumiputra untuk berjuang dan berupaya menempuh pendidikan setinggi-tingginya agar dapat merangkul modernitas sekaligus mengejar ketertinggalan dari orang Eropa.

Tulisan-tulisan Abdul Rivai dalam *Bintang Hindia* memiliki pengaruh yang cukup luas di kalangan bumiputra terpelajar. Jumlah sirkulasi yang amat besar membuat kaum bumiputra terpelajar dapat dengan mudah mengakses dan membaca gagasan Rivai dalam *Bintang Hindia*. Salah satu bumiputra terpelajar yang terpengaruh oleh gagasan Rivai adalah Wahidin Soedirohoesodo. Wahidin merupakan seorang dokter Jawa yang lahir pada tahun 1857 di Yogyakarta (Rahzen, dkk, 2008: 8). Ia lebih dikenal sebagai salah satu pendiri organisasi pergerakan nasional *Boedi Oetomo*. Selain sebagai salah satu pendiri *Boedi Oetomo*, Wahidin juga pernah memimpin sebuah pers bumiputra berorientasi kemajuan bernama *Retnodoemilah*.

Retnodoemilah pertama kali terbit di Yogyakarta pada tahun 1895. Surat kabar ini terbit dalam bahasa Jawa dan Melayu. Pemimpin pertama *Retnodoemilah* adalah F.L. Winter yang merupakan cucu pendiri *Bromartani*, C.F. Winter. Wahidin sendiri baru bergabung dan memimpin surat kabar ini pada Januari 1900. Di tangan Wahidin, gagasan Rivai nampak mempengaruhi orientasi surat kabar ini. Ia mendorong pembaca *Retnodoemilah*

untuk mulai merangkul modernitas, serta membangun organisasi untuk mempromosikan pendidikan di kalangan orang Jawa (Pols, 2019: 45). Wahidin bahkan menyarankan para pembacanya agar menghubungi Abdul Rivai untuk meminta nasihat. *Retnodoemilah* sendiri sangat populer di kalangan guru-guru bumiputra (Adam, 2003: 152). Dengan demikian, melalui *Retnodoemilah* para guru bumiputra mendapat sarana untuk menggapai kemajuan.

Pers bumiputra lain yang mencerminkan kesadaran baru bumiputra terpelajar adalah *Medan Prijaji*. *Medan Prijaji* terbit sejak tahun 1907 hingga tahun 1912. *Medan Prijaji* merupakan surat kabar pertama di Hindia Belanda yang seluruh anggota redaksinya adalah berasal dari kaum bumiputra. Sebagaimana *Bintang Hindia*, *Medan Prijaji* menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. *Medan Prijaji* diterbitkan oleh perusahaan penerbitan N.V. *Medan Prijaji* yang didirikan oleh R.M. Tirta Adhi Soerjo dan Haji Mohammad Arsad (Toer, 1985: 49). R. M. Tirta Adhi Soerjo merupakan tokoh utama di balik kemunculan dan perkembangan *Medan Prijaji*. Ia lahir di Bojonegoro pada tahun 1880 dan sempat bersekolah di STOVIA meskipun gagal menyelesaikan studinya (Adam, 2003: 185). *Medan Prijaji* merupakan surat kabar pertama di Hindia Belanda yang dikelola sepenuhnya oleh kaum bumiputra baik dalam proses produksi maupun secara keredaksian. Pendirian *Medan Prijaji* inilah yang menjadi tonggak baru bagi perkembangan pers bumiputra di Hindia Belanda.

Medan Prijaji berperan penting dalam mendorong kemunculan kesadaran nasional Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam slogan *Medan Prijaji* yaitu “*SOEARA bagi sekalian Radja-radja, Bangsawan asali dan fikiran, Prijaji dan saudagar Boemipoetra dan officier-officier serta*

saudagar-saudagar dari bangsa jang terperintah laenja, jang dipersamakan dengan Anaknegri, di seloeroeh Hindia Olanda” (Toer, 1985: 47). Konsep “*bangsa jang terperintah*” dalam slogan *Medan Prijaji* tersebut sarat dengan makna politis. Konsep tersebut memberikan identitas kolektif bagi berbagai suku bangsa di Hindia Belanda yang pada masa tersebut mengalami tindakan diskriminatif serta represif dari pemerintah kolonial. Melalui identitas kolektif tersebut, perasaan senasib dan sepenanggungan dari berbagai suku bangsa di Hindia Belanda secara perlahan mulai muncul.

Isi *Medan Prijaji* benar-benar mencerminkan slogan dari surat kabar tersebut. Sejumlah rubrik tetap dalam *Medan Prijaji* antara lain “mutasi pegawai negeri”, “salinan lembaran negara”, “surat pembaca”, “cerita bersambung”, dan sebagainya (Toer, 1985: 46). Rubrik “surat pembaca” merupakan rubrik yang paling banyak mendapat perhatian dalam surat kabar ini. Tirta tidak hanya sekedar menanggapi surat dari pembaca saja namun juga memberikan bantuan hukum bagi pembaca yang mengadukan permasalahannya ke *Medan Prijaji*. Fungsi jurnalisme advokasi ini merupakan hal yang benar-benar baru dalam dunia pers di Hindia Belanda pada masa tersebut.

Selain *Medan Prijaji*, Tirta juga pernah mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama *Poetri Hindia*. *Poetri Hindia* merupakan surat kabar pertama yang didirikan khusus bagi perempuan bumiputra di Hindia Belanda. *Poetri Hindia* terbit kerja sama antara Tirta Adhi Soerjo dan R.T.A Tirtokoesomo. *Poetri Hindia* merupakan surat kabar yang bertujuan untuk memajukan perempuan bumiputra di Hindia Belanda (Nuryanti, 2008: 33). *Poetri Hindia* merupakan surat kabar yang mengusung semangat kemajuan bagi perempuan bumiputra. Tirta Adhi

Soerjo bercita-cita agar kaum perempuan di Hindia Belanda dapat memiliki kedudukan yang setara dengan kaum laki-laki. Artinya, diskriminasi yang selama ini terjadi terhadap kaum perempuan harus segera mungkin dihapus. Semangat untuk memajukan perempuan bumiputra inilah yang menjadi keunikan dari *Poetri Hindia* apabila dibandingkan dengan surat kabar sezaman lainnya.

Tokoh-tokoh perempuan bumiputra mendominasi susunan redaksi *Poetri Hindia*. Pada awalnya, Tirto Adhi Soerjo sempat menjabat sebagai kepala redaktur di awal berdirinya *Poetri Hindia*. Pada tahun 1911, Tirto menyerahkan posisinya tersebut kepada R.A. Hendraningrat. Terpilihnya R.A. Hendraningrat sebagai kepala redaktur inilah yang menjadikannya sebagai kepala redaktur perempuan pertama di Hindia Belanda. Selain R.A. Hendraningrat, perempuan bumiputra lain yang pernah mengisi jajaran redaksi *Poetri Hindia* antara lain, R.A. Tjokoroadikoesoemo dari Cianjur, R.A. Siti Habibah, istri Tirto Adhi Soerjo, dan R.A. Mangkoedimejo dari Yogyakarta.

Dominasi perempuan dalam jajaran redaksi *Poetri Hindia* inilah yang menegaskan konsistensi sikap surat kabar ini yang mendukung kemajuan perempuan bumiputra di Hindia Belanda. Pada masa sebelumnya, jajaran redaksi surat kabar selalu didominasi oleh kaum pria. *Poetri Hindia* mampu hadir mendobrak dominasi kaum pria dalam bidang pers. Rubrik-rubrik dalam *Poetri Hindia* juga diperuntukkan khusus bagi kaum perempuan. Contoh rubrik yang terdapat dalam *Poetri Hindia* antara lain *Pemeliharaan Anak*, *Perempuan Hindia*, *Perawatan Kecantikan*, *Unggah-unggah (Etika) berkeluarga*, dan sebagainya (Nuryanti, 2008: 34). *Poetri Hindia* dengan demikian merupakan surat kabar yang dikelola oleh perempuan bumiputra dan diterbitkan juga untuk kepentingan

perempuan bumiputra. Kehadiran *Poetri Hindia* menunjukkan dengan jelas jika kesadaran baru pers juga mencakup semangat emansipasi bagi perempuan bumiputra.

Bangkitnya kesadaran baru dalam pers bumiputra merupakan suatu revolusi dalam bidang pers di Hindia Belanda pada awal abad kedua puluh. Semangat kemajuan, yang merupakan warisan dari kebijakan politik etis nampak menjadi stimulus bagi kaum bumiputra terpelajar. Kaum bumiputra terpelajar mulai menuliskan ide-ide kemajuan bangsanya melalui berbagai surat kabar. Hal tersebut salah satunya ditandai dengan keinginan untuk menguasai ilmu pengetahuan serta kesadaran baru yang disebarluaskan oleh berbagai pers bumiputra. Semangat kemajuan tersebut juga mencakup kesadaran politis sebagai *bangsa yang terperintah* di Hindia Belanda serta semangat emansipasi bagi perempuan bumiputra. Kesadaran baru pers bumiputra ini merupakan suatu tanda awal kebangkitan intelektual kaum bumiputra.

Semangat kemajuan yang disuarakan para perintis seperti Abdoel Rivai, Wahidin Soedirohoesodo, dan Tirto Adhi Soerjo terus diartikulasikan oleh bumiputra terpelajar dari generasi setelahnya. Semangat inilah yang kelak berkembang menjadi kesadaran nasional bangsa Indonesia untuk melepaskan diri cengkeraman kolonialisme Belanda. Hal tersebut, tentu mustahil terwujud tanpa didahului oleh kebangkitan kesadaran baru pers bumiputra yang terjadi pada awal abad kedua puluh.

KESIMPULAN

Pers dan Politik memiliki keterkaitan yang erat. Perkembangan pers di Hindia Belanda selalu berkaitan dengan kondisi sosial politik pada masing-masing zaman. Pada mulanya, pemerintah kolonial berupaya mengekang perkembangan pers di Hindia Belanda

sehingga hanya pers pemerintah yang dapat terbit. Seiring berjalannya waktu, pada paruh kedua abad kesembilan belas mulai muncul pers berbahasa anak negeri yang memiliki orientasi komersial dan misionaris. Pada masa ini, kaum bumiputra nyaris belum memiliki peran dalam bidang pers.

Pada awal abad XX, Hindia Belanda mengalami perkembangan sosial politik yang amat kompleks akibat diberlakukannya politik etis. Politik etis berdampak ke berbagai bidang kehidupan termasuk bidang pers yang ditandai dengan kemunculan pers bumiputra. Di sisi lain, politik etis juga melahirkan kelas sosial baru yang dikenal dengan istilah bumiputra terpelajar. Kaum bumiputra terpelajar inilah yang berperan sebagai aktor utama dalam bidang pers. Pada masa ini, muncul kesadaran baru dalam bidang pers yang dikelola kaum bumiputra terpelajar. Kesadaran baru tersebut ialah semangat menggapai kemajuan yang terwujud dalam suatu keinginan mencapai status sosial yang ideal baik secara individu maupun kolektif yang meliputi kemajuan pendidikan, modernisasi, kehormatan, serta keberhasilan hidup. Kehadiran kaum bumiputra terpelajar serta kemunculan semangat kemajuan inilah yang memunculkan kesadaran baru dalam perkembangan pers bumiputra di Hindia Belanda.

Pers bumiputra dengan kesadaran baru dapat dilihat diantaranya dalam surat kabar *Bintang Hindia*, *Retnodoemilah*, *Medan Prijaji*, dan *Poetri Hindia*. Surat kabar tersebut dikelola oleh para bumiputra terpelajar. *Bintang Hindia* dikelola oleh Abdul Rivai, sementara itu Wahidin Soedirohoesodo mengelola surat kabar *Retnodoemilah* dan Tirto Adhi Soerjo mengelola *Medan Prijaji* serta *Poetri Hindia*. Para bumiputra terpelajar tersebut mulai menuliskan gagasan kemajuan bangsanya melalui berbagai

surat kabar. Gagasan kemajuan tersebut juga mencakup kesadaran politis sebagai *bangsa jang terperintah* di Hindia Belanda serta semangat emansipasi bagi perempuan bumiputra. Melalui berbagai artikel di surat kabar tersebut, semangat kemajuan yang merupakan warisan politik etis memiliki media yang sesuai untuk diartikulasikan di ruang publik Hindia Belanda. Semangat inilah yang kelak berkembang menjadi kesadaran nasional bangsa Indonesia untuk melepaskan diri cengkeraman kolonialisme Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aznar. 2017. Ethical Politic and Emergence of Intellectual Class. *Paramita: Historical Studies Journal*. 27 (1). Hlm. 37-49.
- Adam, Ahmat. 2003. *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Fachrurozi, Miftahul Habib. 2017. Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX. *Istoria*, 12 (1). Hlm. 21-32.
- Furnivall, J.S. 2009. *Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute.
- Harsono, Andreas. 2010. *Agama Saya Adalah Jurnalisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hill, David T. 2007. *The Press in New Order Indonesia*. Jakarta: PT Equinox Publishing Indonesia.
- Hutagalung, Inge. 2013. Dinamika Sistem Pers di Indonesia. *Jurnal Interaksi*. II (2). Hlm. 53-60.
- Juliati, Dewi & Asnan, Gusti. 2012. Pers Bumiputra: Media Ekspresi Nasionalisme Indonesia. dalam A.B. Lapijan, dkk. *Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 5 Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nimmo, Dan. 1989. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nio Joe Lan. 1940. *Riwajat 40 Taon T.H.H.K. Batavia*. Batavia: Tiong Hoa Hwe Koan.
- Nordholt, Henk Schute, dkk. 2013. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nuryanti, Reni. 2008. Soenting Melajoe. dalam Rhoma Dwi Aria Yuliantri, dkk. *Seabad Pers Perempuan: Bahasa Ibu Bahasa Bangsa*. Yogyakarta: I:BOEKOE.
- Poeze, Harry. A. 2008. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Belanda (1600-1950)*. Jakarta: Penerbit KPG.
- Pols, Hans. 2019. *Merawat Bangsa: Sejarah Pergerakan Para Dokter Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahzen, dkk, Taufik. 2007. *Tanah Air Bahasa: Seratus Jejak Pers di Indonesia*, Yogyakarta: I:BOEKOE.
- Ricklefs, M. C. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: UGM Press.
- Rivai, Abdul. 1905. Kaoem Moeda. *Bintang Hindia*, hlm. tidak terbaca.
- _____. 1906. Bangsawan Fikiran. *Bintang Hindia*, hlm. tidak terbaca.
- Samuel, Hanneman. 2010. *Genealogi Kekuasaan Ilmu Sosial: Dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*. Jakarta: Kepik Ungu.
- Simbolon, Parakitri T. 2006. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Smith, Edward. C. 1986. *Pembredelan Pers di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Grafitipers.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. 1980. *Beberapa Segi Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Tim Periset Seabad Pers Kebangsaan. 2008. *Seabad Pers Kebangsaan*. Yogyakarta: I:BOEKOE.
- Toer, Pramoedya Ananta. 1985. *Sang Pemula*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Van Niel, Robert. 2009. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Yudi Latif. 2012. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama